

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN
LIAR DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI



Oleh:
Subina
NIM : 4011311101
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN
LIAR DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
Subina
NIM : 4011311101
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Subina

Nim : 4011311101

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI
KABUPATEN BANGKA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang betanda tangan



Subina

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR
DI KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI

Oleh:
Subina
NIM: 4011311101
Konsentrasi: Hukum Pidana

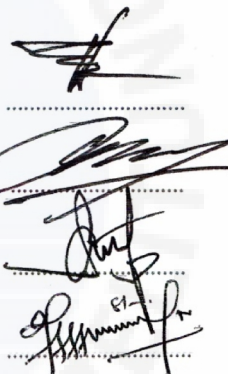
Telah Dipertahankan di Hadapan Majelis Penguji
Pada Tanggal 03 Agustus 2017
Dan Dinyatakan **LULUS**
Majelis Penguji:

1. Ketua : Syamsul Hadi, SH.,MH.
NP.606007014

2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, SH.,MH.
NP.608010028

3. Anggota : Toni, SH.,MH.
NP. 608010028

4. Anggota : Reko Dwi Salfutra, SH.,MH.
NIP.198504122014041002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN PERSETUJUAN

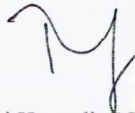
**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR
DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

Oleh :
Subina
NIM : 4011311101
Konsentrasi : Hukum Pidana

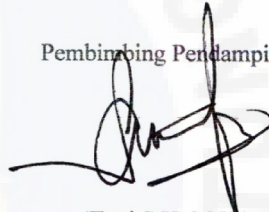
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Kepada Allah SWT, dengan segala kebesarannya yang maha mengabulkan segala doa dan syukur penulis, serta memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Untuk kedua orang tua saya yang terkasih bapak H. Amirudin dan ibu Hj. Siti hatijah yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Untuk kakak tercinta saya, Merissa S.kom, Sri Rahayu S.kep, Firmansyah, Hajaria, Harmoko
- Untuk Keluarga Besar saya yang telah banyak membantu, memberikan doa dan motivasi kepada saya.
- Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, doa dan memberikan banyak bantuan.
- Untuk Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan berbagai kenangan yang indah semasa kuliah.

MOTTO HIDUP

“Saya Percaya Selalu Ada Harapan Yang Lebih Baik Di Depan Sana Asalkan Kita Tidak Pernah Berhenti Untuk Berusaha, Bersyukur dan Dilandasi Doa”

(Joko Susilo)

ABSTRAK

Subina
4011311096

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KABUPATEN BANGKA.

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: Polisi Kehutanan, Tindak Pidana, Penebangan Liar

Polisi Kehutanan merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat dan pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, kawasan hutan, tumbuhan dan satwa liar sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan bertugas untuk mengatasi, mencegah dan menangani tindak pidana penebangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang peran polisi kehutanan dalam penegakan hukum tindak pidana penebangan liar, serta untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran polisi kehutanan di Kabupaten Bangka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Polisi Kehutanan di Kabupaten Bangka adalah mengadakan patroli, mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai tata cara perizinan yang berkaitan dengan mengelola hasil kawasan hutan, izin tata cara pengelolaan kawasan hutan yang sah, izin tentang tata cara pemungutan hasil hutan, dan izin pemanfaatan hutan yang baik, serta melakukan pengawasan dengan diterapkannya plang yang berisikan sanksi, perintah dan larangan terkait dengan perlindungan hutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya yaitu SDM (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana yang tidak memadai baik daerah perairan maupun perbukitan, dana yang kurang membuat polisi kehutanan kesulitan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perintah Undang-Undang, serta kebiasaan masyarakat dan pola pikir dari masyarakat.

ABSTRACT

Subina
4011311101

THE ROLE OF FORESTRY POLICE IN LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING IN BANGKA REGENCY

Thesis Faculty Of Law 2017

Keywords: Forestry Police, Criminal Act, Illegal Logging

Forestry police is a certain official within the scope of central forestry agencies and/or regional which is in accordance with the nature and work to organize and/or implement forest protection efforts by the power of the law is granted special police authority in the field of forestry and conservation biological resources and its ecosystem that is in one command unit. As a law enforcer who has the duty and authority in protecting and implementing forest security, forest areas, plants and wildlife as in accordance with the duties and functions based on Minister Of Forestry Regulation Number. 75 of 2014 on forestry police, forestry police in charge of overcoming, preventing and dealing with illegal logging. The purpose of this research is to understand about the role of forestry police in Bangka Regency. This research was conducted by using Empirical Juridical method with Normatif Juridical approach. The result of this research indicates that the role of forestry police in Bangka Regency is patrolling, counseling or doing socialization about licensing procedures related to manage forest products, permit for a legitimate forest management system, permit on forest harvesting procedure and good forest utilization permits, and also doing supervision with the implementation of a signpost containing sanctions, orders and restriction related of forest protection. Factor affecting forestry police in carrying out its duty i.e human resources, facilities and infrastructure that are not adequate both the water and hilly areas, the less off funds make the forestry police has difficulties to be able to perform its duties and functions according to the law, and the habits and mindset of the community.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmat Allah dapat diselesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka”** ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Selama dalam persiapan, penyusunan, sampai proses penyelesaian skripsi, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, penulis banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Rektor Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama Yang Telah Banyak Membantu Memberikan Bantuan Dan Dukungan Dalam Penulisan Skripsi Ini.
6. Bapak Toni, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Pendamping Yang Telah Banyak Membantu Memberikan Bantuan dan Motivasi Dalam Penulisan Skripsi Ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Sahabat-sahabat terbaik saya Riska Handayani, Resy Ayu Lestary, Erviani, Sukarni dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dimana diharapkan dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun dan member motivasi kepadapenulis demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, Agustus 2017

Penulis

Subina



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1 0
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DAN POLISI	
KEHUTANAN	24
A. Penegakan Hukum.....	24
B. Tindak Pidana Penebangan Liar.....	31

C. Kajian Perbandingan Negara Tentang Tindak Pidana Kehutanan	41
D. Polisi Kehutanan	51
BAB III PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KABUPATEN BANGKA	60
A. Peran Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka...	60
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka	90
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sistem Perumusan Sanksi Pidana Penebangan Liar	49
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Contoh Pemasangan Plang	72
---	----

